

## KONTRIBUSI BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X SMK PGRI 1 BADUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Ni Rai Seni, I Nyoman Natajaya, Anak Agung Gede Agung

<sup>1,3</sup>Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {rai.seni, nyoman.natajaya, gede.agung }@pasca.undiksha.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa kelas X SMK PGRI 1 Badung Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini adalah penelitian *ex-post facto*. Sampel penelitian ini sebanyak 169 siswa. Data biaya pendidikan dikumpulkan dengan metode angket, data pengelolaan pembelajaran dikumpulkan dengan metode kuesioner dan data prestasi belajar siswa dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, regresi ganda, dan korelasi partial. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung pada tahun pelajaran 2015/2016 sebesar Rp. 11.343.000. 2) terdapat kontribusi yang signifikan biaya pendidikan dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung dengan Freg = 17,573 ( $p < 0,05$ ) dan sumbangan efektif sebesar 6,11%. 3) terdapat kontribusi yang signifikan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung dengan Freg = 72,478 ( $p < 0,05$ ) dan sumbangan efektif sebesar 27,88%. Dan 4) terdapat kontribusi yang signifikan secara simultan antara biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung dengan Freg = 42,766 ( $p < 0,05$ ) dan sumbangan efektif sebesar 33,99%.

*Kata kunci:* biaya pendidikan, pengelolaan pembelajaran, prestasi belajar siswa.

### Abstract

This study aims to determine the contribution of education costs and management of learning on student achievement class X SMK PGRI 1 Badung Lesson Year 2015/2016. This research is an *ex-post facto* research. The sample of this study were 169 students. Data of education cost collected by questionnaire method, learning management data collected by questionnaire method and student achievement data collected by documentation method. Data analysis used was simple regression analysis, multiple regression, and partial correlation. Based on the research that has been done can be concluded that: 1) the average cost of education issued by each student Class X SMK PGRI 1 Badung in the school year 2015/2016 of Rp. 11343000. 2) there is significant contribution of education cost with student achievement of Class X SMK PGRI 1 Badung with Freg = 17,573 ( $p < 0,05$ ) and effective contribution equal to 6,11%. 3) there is a significant contribution of learning management with student achievement of Class X SMK PGRI 1 Badung with Freg = 72,478 ( $p < 0,05$ ) and effective contribution equal to 27,88%. And 4) there is a significant contribution simultaneously between education cost and management of learning with student achievement of Class X SMK PGRI 1 Badung with Freg = 42,766 ( $p < 0,05$ ) and effective contribution equal to 33,99%.

*Keywords:* cost of education, learning management, student achievement.

## PENDAHULUAN

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif atau yang bersifat kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telah mengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada pasal 1 Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap negara yang berusia 7 tahun sampai 15 tahun. Lebih lanjut pada pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Disamping itu disebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Bab VIII wajib belajar pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Amanat UUD 45 Pasal 31 ayat (4) bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam UU No. 20/2003 Pasal 49 ayat (1) bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dilokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

Mahalnya biaya pendidikan, yang diawali dengan tingginya pungutan masuk sekolah, masih menjadi masalah banyak orang tua. Jangankan mengakses pendidikan berkualitas, masuk kesekolah reguler saja masih banyak yang merasa tidak sanggup. Meski pemerintah sudah berjanji menggratiskan biaya pendidikan, nyatanya cukup banyak sekolah yang menetapkan biaya masuk berkedok sumbangan yang diwajibkan pada setiap orang tua siswa. (<http://www.kompas.com>)

Bertolak dari kondisi di atas, kalau saja prinsip-prinsip good governance dilaksanakan dengan tegas dalam administrasi keuangan negara, sebenarnya masih ada peluang untuk meningkatkan persentase APBN dan APBD provinsi maupun kabupaten/kota hingga mencapai 20% untuk penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan merupakan investasi fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia dimana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai faktor pendukung upaya manusia untuk melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu sumber daya manusia yang bermutu sebagai hasil pendidikan harus dijadikan kunci sukses pribadi, masyarakat, bangsa, dan Negara. Ini berarti sumber daya manusia (SDM) harus menduduki prioritas yang tinggi baik dalam keluarga, masyarakat bangsa dan Negara (Rinjin 2007).

Kunci dan jaminan masa depan bangsa dan negara terletak pada ketersediaan jumlah sumberdaya manusia yang bermutu, bukan semata-mata pada sumberdaya alam atau sumberdaya fisik. Apalagi sumberdaya alam Indonesia sudah banyak habis terkuras dan

semakin lama akan makin terdegradasi. Bahkan semenjak pertengahan tahun 2004, Indonesia sudah menjadi *net importer* bahan bakar minyak.

Merupakan suatu aksioma yang tak terbantahkan, baik secara teoretis maupun secara empiris, bahwa pendidikan dalam arti luas adalah satu-satunya jalan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu. Yang dimaksud dengan pendidikan dalam arti luas adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan mewujudkan potensinya sebagai karunia Tuhan secara optimal, baik secara mandiri maupun dengan bantuan dan bimbingan orang lain, dan berlangsung sepanjang hayat (UU Sisdiknas 20 Tahun 2003). SDM yang bermutu, hanya akan tercapai apabila institusi yang menyelenggarakan pendidikan memenuhi standar pelayanan minimal serta mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu.

Salah satu implikasi dan prinsip standar pelayanan minimal adalah adanya patokan suatu biaya pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, serta pengelolaan lembaga pendidikan secara efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu. Hal ini penting dan bermanfaat untuk menghindari timbulnya pendapat di kalangan masyarakat yang menghendaki biaya pendidikan yang rendah, tetapi menuntut mutu yang baik. Di lain pihak, pengelolaan lembaga pendidikan yang favorit tergiur untuk mengenakan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga terkesan eksklusif dan elit tanpa memberi kesempatan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sampai saat ini sejauh yang diketahui peneliti, para perencana pendidikan di tanah air sebelum banyak yang meneliti tentang standar satuan biaya pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, baik negeri, maupun swasta. Dinas pendidikan Provinsi Bali tampaknya mulai mengadakan terobosan untuk menetapkan standar biaya pendidikan yang wajar dengan membentuk tim yang ditugasi berdasarkan usulan masyarakat.

Kelas X SMK PGRI 1 Badung merupakan sekolah swasta yang didirikan di bawah Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Badung pada tanggal 25 Juni 1990. Kelas X SMK PGRI 1 Badung saat ini membuka 3 program keahlian yaitu Program Keahlian Akomodasi Perhotelan, Program Keahlian Tata Boga dan Program Keahlian Multi Media. Ciri khas pendidikan di Kelas X SMK PGRI 1 Badung bernuansa Kebudayaan, dan Lingkungan hidup. Dalam pengelolannya mengupayakan peserta didik menjadi orang yang cerdas, unggul, trampil dan bermoral, jujur serta mampu mengatasi tantangan masa depan. Perkembangan dan tantangan yang ditandai oleh perkembangan iptek memacu sekolah untuk merespon dengan cepat dan berorientasi kedepan dengan memperhatikan potensi kekinian sesuai dengan norma dan harapan masyarakat.

Dari sejak didirikan itu belum pernah ada penelitian yang berkaitan dengan masalah pembiayaan pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan mutu, padahal pengetahuan tentang pembiayaan pendidikan sangatlah penting diketahui, terutama oleh pengelola sehingga ketika hendak membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembiayaan, ada dasar yang dapat dipedomi. Dengan demikian keputusan yang diambil bersifat akurat karena sudah didasarkan pada acuan yang jelas.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta implementasi prinsip eektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, maka studi mengenai perhitungan satuan biaya pendidikan suatu kiniscayaan bagi Kelas X SMK PGRI 1 Badung yang berstatus swasta di bawah Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Badung. Apalagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini menjadi makin mendesak dan strategis karena adanya tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan yang berimplikasi pada kenaikan biaya pendidikan.

Hasil amatan penulis di lapangan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 di Kelas X SMK PGRI 1 Badung masih ada guru yang belum menyiapkan program pembelajaran sebelum proses belajar mengajar (PBM) di lakukan, belum mampu mengikuti perkembangan buku-buku pelajaran yang digunakan di SMK, belum mampu menerapkan variasi jenis evaluasi, apalagi menerapkan asesmen portofolio. Dalam hal penyediaan alat/bahan , Laboratorium Akomodasi

Perhotelan, Laboratorium Tata Boga dan Laboratorium Multi Media masih perlu adanya penghitungan keperluan secara cermat sehingga terhindar dari kekurangan bahan-bahan laboratorium yang dibutuhkan untuk pratikum siswa. Semua kenyataan-kenyataan di atas sebetulnya terkait erat dengan besarnya anggaran sekolah terhadap mata anggaran PBM dan pengelolaan laboratorium, namun demikian samapai saat ini belum pernah diteliti mengenai keterkaitan besarnya mata anggaran yang dihubungkan dengan PBM dan penggunaan alat/bahan laboratorium.

Hasil belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung belum mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Dari peserta ujian sebanyak 300. orang yang terdiri dari 132 orang putra dan 168 .putri, dinyatakan lulus 300 orang (100%) dengan jumlah nilai rata-rata terendah 67,48 dan tertinggi 90,75. Dilihat dari mata pelajaran yang di UN-kan dan mengacu kepada prinsip *mastery learning*, berarti pencapaian siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung Tahun Pelajaran 2013/2014 termasuk kategori tuntas. Apakah ini cerminan dari dukungan pembiayaan yang memadai, untuk itu perlu dilihat lebih lanjut.

Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap biaya pendidikan kini telah besar, karena tersedianya biaya pendidikan yang memadai untuk penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu merupakan suatu *condition sine qua non*. Bahkan biaya pendidikan itu makin meningkat dari waktu ke waktu, bukan semata-mata karena factor inflasi, tetapi karena tuntutan kemajuan teknologi, termasuk teknologi pembelajaran, sarana, fasilitas pembelajaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pendidikan merupakan sector yang intensif tenaga, bahkan tenaga yang professional yang dengan sendirinya memerlukan biaya. Oleh karena itu perlu ada studi yang mendalam tentang satuan biaya pendidikan agar dapat menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa masih jauh dari yang diharapkan. Masalah disana-sini masih sering terjadi. Namun yang paling jelas adalah masalah mahalnnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat kalangan bawah. Seharusnya pendidikan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi salah satu tujuan Negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.. Ini mempunyai konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan yang layak. Maka tentu saja Negara dalam hal ini Pemerihintah harus mengusahakan agar pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan merupakan factor kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan. Biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi karena dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya pendidikan di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah ke atas walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada dasarnya SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan merumuskan standar isi (kurikulum), proses, kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar-standar itulah yang menjadi acuan dasar dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk juga harus dipacu oleh daerah-daerah dalam merencanakan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, maka kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat serta mengantisipasi penyebaran mutu yang tidak seimbang antar daerah.

Itulah hal-hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai satuan biaya pendidikan di kelas X SMK PGRI 1 Badung. Masalah pembiayaan menjadi sangat

strategis oleh karena sangat erat hubungannya dengan permasalahan pendidikan, terutama aspek mutunya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian korelasional. Penelitian korelasional bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi. Penelitian ini sangat cocok bila variabel-variabel yang terlibat sangat kompleks dan tidak dapat diteliti lewat metode eksperimentasi atau yang variasinya tidak dapat dikendalikan. Dengan penelitian asosiatif/korelasional, pengukuran terhadap beberapa variabel serta saling-hubungan di antara variabel-variabel tersebut dapat dilakukan serentak dalam kondisi realistik.

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Badung Periode Tahun 2015/2016 yang berjumlah 303 orang. Berdasarkan tabel penentuan sampel penelitian menurut Morgan, apabila populasi sebanyak 303 orang, maka sampel minimal yang harus digunakan adalah 169 orang.

Variable bebas adalah factor yang sengaja dimunculkan, dan diukur oleh peneliti dan dikenakan pada kelompok yang diteliti. Sebagai variable bebas dalam penelitian ini adalah jumlah biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran.

Variabel Terikat yaitu variabel yang merupakan akibat karena adanya variable bebas (Sugiono, 2010:3). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode yakni metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut: (1) deskripsi data, (2) melakukan uji prasyarat analisis, dan (3) menguji hipotesis.

Data mentah yang telah terkumpul perlu dideskripsikan sehingga memudahkan pemahamannya. Untuk keperluan ini, data variabel biaya pendidikan, proses pembelajaran dan prestasi belajar siswa dideskripsikan dengan statistik deskriptif. Analisis deskripsi dilakukan untuk dapat mendeskripsikan dengan jelas semua variabel penelitian (Sugiyono, 2010). Analisis deskriptif yang dimaksud adalah deskripsi dari distribusi frekuensi ( $f$ ), skor rata-rata ( $Mean$ ), modus, median, skor tertinggi, skor terendah, rentangan, besar kelas interval, lebar kelas, dan simpangan baku.

Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.

### a. Uji Normalitas Sebaran Data

Uji normalitas sebaran data dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran frekuensi skor pada setiap variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan kriteria : Jika  $p > 0,05$  sebaran datanya berdistribusi normal, sebaliknya jika  $p < 0,05$  sebaran datanya tidak normal. Perhitungan dibantu dilakukan dengan bantuan komputer melalui program SPSS 17.0 for windows.

### b. Uji Linieritas dan Keberartian Arah Garis Regresi

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel terikat dengan masing-masing variabel bebas. Pedoman untuk melihat kelinieran adalah dengan mengkaji lajur *Dev, from linierity* dari modul MEANS, sedangkan untuk melihat keberartian arah regresinya berpedoman pada lajur *linierity*. Statistik yang dihasilkan dari modul tersebut adalah statistic F. bila  $F, Dev, From Linierity$  dengan  $p > 0,05$ , maka bentuk regresinya linier, dan sebaliknya  $p < 0,05$  maka regresinya tidak linier. Bila  $F$  linierity dengan  $p < 0,05$  maka koefisien regresinya yang diperoleh signifikan dan bila  $p > 0,05$  maka koefisien regresinya tidak signifikan. Untuk menguji linieritas dan keberartian regresi digunakan program SPSS 17.0 for windows.

### c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dikenakan pada variabel bebas. Multikolinieritas maksudnya adalah antara sesama variabel bebas tidak terdapat muatan faktor bersama yang terlalu tinggi. Untuk

memeriksa apakah multikolinieritas itu terjadi, dapat dihitung interkorelasinya antar variabel bebas dan menyajikannya dalam matriks interkorelasi. Selanjutnya dikatakan bahwa koefisien korelasi yang besar dalam matriks selalu merupakan pertanda adanya multikolinieritas. Pengujian Multikolinieritas dapat menggunakan patokan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan koefisien kontribusi antar variabel bebas. Pengujian : jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki tolerance mendekati 1, maka dikatakan tidak terjadi Multikolinieritas antar variabel bebas (Candiasa, 2004).

#### **d. Uji Heterokedastisitas**

Untuk mengetahui heteroskedastisitas digunakan program analisis regresi linier, *method enter*, dan *Plots*, kriteria keputusannya adalah : jika ada pola tertentu seperti titik-titik ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola tertentu yang jelas, serta titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai. Untuk perhitungan menggunakan SPSS for windows 17.00.

#### **e. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu ( $et$ ) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ( $et-1$ ). Adapun cara yang dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah dengan uji *Durbin Watson*. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai *Durbin Watson* hitung mendekati atau disekitar angka 2 maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi (Nugroho, 2005). Sedangkan analisisnya dilakukan dengan SPSS 17.0 for Windows.

Sedangkan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi sederhana, korelasi ganda, dan korelasi parsial.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Besarnya Biaya Pendidikan Siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung pada Tahun Pelajaran 2015/2016**

Besaran biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing siswa kelas X SMK PGRI 1 Badung pada tahun pelajaran 2015/2016 adalah 1) buku LKS sebesar Rp. 253.000, 2) alat tulis sebesar Rp. 50.000, 3) tas sekolah sebesar Rp. 150.000, 4) sepatu sebesar Rp. 150.000, 5) Pakaian Seragam sebesar Rp. 1.200.000, 6) pakaian olah raga dan ekstra sebesar Rp. 220.000, 7) uang saku sebesar Rp. 2.600.000, 8) transportasi sebesar Rp. 1.440.000, 9) SPP sebesar Rp. 2.580.000, 10) bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.200.000, dan 11) bantuan dari pemerintah kabupaten badung sebesar Rp. 1.500.000.

Berdasarkan pemaparan di atas, total biaya yang diperlukan siswa kelas X dalam mengikuti pembelajaran di SMK PGRI 1 Badung tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebesar Rp. 11.343.000,- per masing-masing siswa.

#### **2. Terdapat kontribusi yang signifikan biaya pendidikan dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung**

Pengujian hipotesis pertama mendapatkan simpulan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan biaya pendidikan dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung. Hasil tersebut dapat dilihat pada persamaan garis regresi  $\hat{y} = 34,567 + 0,309X_1$  dengan Freg = 17,573 adalah signifikan dan linier. Karena Freg > Ftabel. Korelasi antara biaya pendidikan dengan Prestasi belajar, diperoleh  $r_{hitung}$  sebesar = 0,309. Ini berarti  $r_{hitung} = 0,309$  signifikan pada  $\alpha = 0,05$  ( $r_{tabel} = 0, 0,148$ ) dengan hubungan sebesar 9,5%. Sumbangan efektif yang diperoleh sebesar 6,11%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Biaya Pendidikan, Lingkungan Kampus dan Proses Pembelajaran Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Universitas Bakrie. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa variabel biaya pendidikan dan proses pembelajaran paling berpengaruh terhadap motivasi berprestasi mahasiswa Universitas Bakrie sedangkan variabel lingkungan kampus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi berprestasi mahasiswa Universitas Bakrie. Berdasarkan hasil Uji-F menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap motivasi berprestasi mahasiswa Universitas Bakrie. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0.343 yang berarti 34.3% motivasi berprestasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel biaya pendidikan, lingkungan kampus dan proses pembelajaran, sedangkan 65.7% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian kali ini.

Levin, (dalam Artana, 2010) menyatakan pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah diberbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.

Wisemen (dalam Artana, 2010) menjelaskan terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan :

- 1) Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sector pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia/*human capital*.
- 2) Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan.
- 3) Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Tinggi rendahnya biaya pendidikan secara nyata sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Salah satu contoh sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang favorit, tidak dipungkiri biaya pendidikan di sekolah tersebut lebih tinggi dari sekolah biasanya. Semakin tinggi biaya pendidikan suatu sekolah, biasanya kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa semakin baik pula. Apabila kualitas pembelajaran sudah baik, tentunya berdampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Hal tersebut sejalan dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yakni terdapat kontribusi yang signifikan biaya pendidikan dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung.

### **3. Terdapat kontribusi yang signifikan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung**

Pengujian hipotesis kedua mendapatkan simpulan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung. Hasil tersebut dapat dilihat pada persamaan garis regresi  $\hat{y} = 22,485 + 0,550X_2$  dengan Freg = 72,478 adalah signifikan dan linier. Hal itu dikarenakan Freg > Ftabel. Berdasarkan analisis dengan komputer, Korelasi antara Pengelolaan pembelajaran ( $X_2$ ) dengan Prestasi belajar ( $Y$ ) diperoleh  $r_{hitung}$  sebesar = 0,550. Ini berarti  $r_{hitung} = 0,550$  signifikan pada  $\alpha = 0,05$  ( $r_{tabel} = 0, 0,148$ ) dengan hubungan sebesar 30,3%. Sumbangan efektif yang diperoleh sebesar 27,88%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Markamah, dkk (2013) yang berjudul Korelasi Antara Pengelolaan Kelas oleh Guru dengan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 39 Pontianak Kota. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa nilai persentase angket sebesar 84,80% dan nilai rata-rata keseluruhan hasil belajar siswa sebesar 70,56. Hasil perhitungan statistic dengan menggunakan rumus korelasi product moment diperoleh hasil  $r$  hitung sebesar 0,4518 sedangkan  $r$  tabel yaitu 0,195 ini berarti  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel atau ( $0,4518 > 0,195$ ) pada taraf kepercayaan signifikan 5% yang berarti bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan hasil belajar siswa kelas IV SDN 39 Pontianak Kota.

Dalam mengelola proses pembelajaran, seorang guru harus mengacu dengan standar pengelolaan pembelajaran. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu membuat pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang bermakna tentunya disertai dengan pengalaman belajar yang menyenangkan dan dapat dimaknai siswa.

Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya akan berimplikasi dengan penggunaan model, pendekatan, strategi, metode, atau teknik pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan prakarsa dan kemendiriannya. Pengalaman belajar dapat berupa tuntutan aktivitas psikologis maupun fisik, seperti mengkaji, mendeskripsikan, menjelaskan, berlatih, pemetaan, mengerjakan tugas-tugas secara individu/kelompok, dan sebagainya. Mencantumkan sumber belajar yang diperoleh dari berbagai sumber lingkungan sekitar, atau melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

Semakin baik pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tentunya berdampak positif dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Hal tersebut sejalan dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yakni terdapat kontribusi yang signifikan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung.

#### **4. Terdapat kontribusi yang signifikan secara simultan antara biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung**

Pengujian hipotesis ketiga mendapatkan simpulan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan secara simultan antara biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung. Hasil tersebut dapat dilihat pada persamaan garis regresi  $\hat{y} = 14,733 + 0,198X_1 + 0,507X_2$  dengan Freg = 42,766 ( $p < 0,05$ ) adalah signifikan dengan hubungan ( $R$  square x 100) sebesar 34%.

Mutu pendidikan disekolah akan sangat ditentukan oleh factor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses pembelajaran. Kemampuan pengelolaan mutu guru, mutu alat, mutu bahan, dan mutu siswa akan berkaitan satu sama lain. Ketersediaan komponen-komponen tersebut akan menciptakan kondisi yang baik untuk pembelajaran di kelas dan pada gilirannya akan berkaitan erat dengan perolehan prestasi belajar siswa.

Biaya pendidikan meliputi semua biaya yang dimanfaatkan oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan berupa biaya investasi, biaya operasional, biaya bantuan beasiswa dan biaya tak langsung yang dikeluarkan siswa dan berdampak pada mutu prestasi belajar siswa.

Mutu pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh langkah-langkah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tingkat efektifitas biaya yang didasarkan atas peningkatan biaya disertai dengan peningkatan mutu hasil belajar. Mutu hasil belajar dilihat dari: *output*, yakni prestasi belajar siswa dan aspek prestasi sekolah, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan secara simultan antara biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung.

## PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masing-masing siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung pada tahun pelajaran 2015/2016 sebesar Rp. 11.343.000.
2. Terdapat kontribusi yang signifikan biaya pendidikan dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung dengan Freg = 17,573 ( $p < 0,05$ ) dan sumbangan efektif sebesar 6,11%
3. Terdapat kontribusi yang signifikan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung dengan Freg = 72,478 ( $p < 0,05$ ) dan sumbangan efektif sebesar 27,88%.
4. Terdapat kontribusi yang signifikan secara simultan antara biaya pendidikan dan pengelolaan pembelajaran dengan prestasi belajar siswa Kelas X SMK PGRI 1 Badung dengan Freg = 42,766 ( $p < 0,05$ ) dan sumbangan efektif sebesar 33,99%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut.

Seluruh siswa disarankan untuk selalu giat belajar pada seluruh pembelajaran yang diberikan oleh guru, sehingga hasil belajar siswa dapat tercapai secara maksimal.

Seluruh guru disarankan untuk selalu melakukan pengelolaan pembelajaran dengan efektif, efisien dan menyenangkan bagi siswa. Terutama dalam hal penggunaan pembelajaran yang inovatif di kelas.

Kepala sekolah disarankan untuk selalu mengambil keputusan dan kebijakan yang memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan sumber daya manusia guru dan siswa.

Pemerintah disarankan untuk selalu memberikan peluang kepada guru maupun siswa dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. dalam pembiayaan pendidikan, peran pemerintah disarankan untuk selalu mendukung dengan optimal.

Peneliti lain disarankan untuk mengembangkan penelitian ini, sehingga kendala atau permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan dapat diminimalkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anonim, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Artana,Kani I Nyoman. 2010. *“Analisis Biaya Pendidikan Dan Pengaruhnya Terhadap Pengelolaan Pembelajaran Serta Dampaknya Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Tentang Persepsi Para Guru SMP Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2009/2010)”*. Tesis. Singaraja: Program Pascasarjana Undiksha
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK*, 2015, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Markamah, Isrotul, dkk. 2013. Korelasi Antara Pengelolaan Kelas oleh Guru dengan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV Sekolah Dasar

Negeri 39 Pontianak Kota. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Universitas Tanjungpura Volume 2 Nomor 3.*

Putri, Nadia Amanda. 2013. Analisis Pengaruh Biaya Pendidikan, Lingkungan Kampus dan Proses Pembelajaran Terhadap Motivasi Berprestasi Mahasiswa Universitas Bakrie. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Volume 1 Nomor 2.*

Rinjin, Ketut et al. 2007, *Biaya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Provinsi Bali Tahun 2005.* Singaraja: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Sugiyono, 2010. *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV Alfabeta.